

Naskah Akademis

Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden

Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum dan Penguatan Pengawasan Kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

15 Desember -2021

Penegakan hukum merupakan landasan bagi pembangunan di bidang ekonomi termasuk investasi. Hingga tahun kedua pemerintahan Jokowi –Makruf Amin, Persepsi publik terhadap , kinerja di bidang penegakan hukum masih merupakan yang kurang memuaskan. Survey yang dilakukan oleh Charta Politika Pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa 44,6 persen responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih buruk. Sementara itu 3,8 persen menilai penegakan hukum sangat buruk

Penegakan Hukum di Indonesia menghadapi berbagai masalah anatar lain terjadinya kolusi antara aparat penegak hukum dan oknum masyarakat yang untuk bersama melanggar hukum (mafia hukum. Selain itu masih diwarnai dengan maraknya Pungutan Liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam pelayanan terkait dengan pemulihan Covid 19. Paraktek Pungli bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum Misalnya pada bulan November 2021,sebanyak 300 laporan pungutan liar (pungli) oknum polisi masuk ke Polda Metro Jaya. Untuk memberantas Pungli pemerintah telah mengeluarkan Perpres no 87/2016 Tentang Satgas Saber Pungli.

Bersamaan dengan belum membaiknya kinerja di bidang penegakan hukum, Polri juga mendapatkan berbagai kritik dari masyarakat. Beberapa bulan terakhir ini muncul berbagai berita yang mengungkap berbagai sisi negatif atau kekuarangan dalam kinerja Polri. Di Media Sosial juga muncul tagar yang menunjukkan sikap kritisisme dan ketidakpercayaan kepada Polri Polri seperti # Percumalaporpolisi# dan #No Viral No Justice#. Survey yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa 57,9% responden menganggap kinerja Polri buruk dan 25,5% ahli menganggap sangat buruk.

Buruknya kinerja penegkan hukum dan kinerja Polri ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap Polri yang mempunyai kewenangan yang luas. Selain mendapatkan pengawasan internal seperti Inspektorat dan Propam Polri juga mendapatkan pengawasan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) . Jika dibandingkan dengan Komisi Yudisial (KY) dan Komisi kejaksaan (Komjak) dan Komisi Kepolisian di Negara Lain, Kompolnas mempunyai kewenangan yang paling lemah. Komisi ini layaknya sebuah lembaga kajian dan lembaga pemberi rekomendasi

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum, kami sampaikan rekomendasi berikut

1. Untuk memberantas mafia peradilan, Pemerintah membentuk Satgas untuk memerangi mafia peradilan. Satgas ini terdiri dari tokoh masyarakat, aparat penegak hukum dan anggota komisi dalam penegakan hukum ; Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan (Komjak), Komplonas dan instansi terkait
2. Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas Saber Pungli yang dibentuk melalui Perpres No 87/2016. Peningkatan Kinerja Saber Pungli dengan mengaktifkan kembali Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di setiap kementerian. Lembaga pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan penindakan terhadap Pungli di lembaga masing-masing.
3. Memperkuat pengawasan terhadap Polri, dengan memperkuat Kompolnas dalam bidang pengawasan Sehingga kewenangan yang luas yang dimiliki oleh Polri bisa diimbangi dengan pengawasan yang kuat.